

TINJAUAN EKONOMI TERNAK SAPI POTONG DI JAWA TIMUR

Bambang Winarso, Rosmiyati Sajuti, Chaerul Muslim

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

East Java Province is one of potential regions in the country for beef cow development. This is facilitated with sufficient feed from agricultural by-products, the farmers' habits in raising beef cows for additional income, and cows as working animals in farm land. The province produces significant beef cows not only sufficient for satisfying regional demand but also for supply of the outside regions. The beef cow farms develop well in the province due to integration of livestock and farm business. This paper assesses performances of livestock farms and agribusiness consisting of livestock business, marketing channel, and the constraints encountered.

Key words : *beef cows, agribusiness, livestock farms, East Java*

ABSTRAK

Secara nasional wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah pengembangan ternak sapi potong yang sangat potensial. Hal ini ditunjang ketersediaan pakan dari limbah pertanian yang mencukupi, kebiasaan masyarakat yang menjadikan ternak sapi potong sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun sebagai ternak kerja di pertanian. Wilayah ini mampu berswasembada daging sapi, bahkan mampu mensuplai kebutuhan daging ke luar daerah. Kegiatan usaha ternak yang diupayakan pada pemanfaatan limbah pertanian menunjukkan bahwa antara usaha ternak dan usaha tani merupakan suatu sistem usaha yang berkembang di wilayah ini. Kajian ini bertujuan melakukan tinjauan kinerja usaha ternak dan kinerja agribisnis dalam arti luas. Aspek kajian meliputi usaha ternak secara keseluruhan, distribusi mata rantai dan mekanisme pemasaran, serta menelaah kendala dan hambatan yang dihadapi. Bahan kajian berasal dari review hasil-hasil penelitian peternakan sapi potong di Jawa Timur.

Kata kunci : *sapi potong, agribisnis, peternakan, Jawa Timur*

PENDAHULUAN

Daging khususnya daging sapi potong merupakan sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Indonesia sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging tersebut, sehingga sebagian dari kebutuhan masih harus di impor. Kondisi yang demikian mengisyaratkan peluang untuk pengembangan usaha budidaya ternak terutama sapi potong. Namun demikian, kenyataan menunjukkan hal lain, dimana masih banyak hambatan dan kendala yang harus dihadapi baik oleh peternak maupun pengusaha. Provinsi Jawa Timur yang selama ini dijadikan andalan pemasok kebutuhan daging dalam negeri berada dalam kondisi memprihatinkan. Dalam upaya menghadapi kebutuhan daging lokal yang terus meningkat, juga dituntut untuk senantiasa mampu menjaga

kontinuitas pasokan ternak ke wilayah konsumen. Perkembangan pasokan ternak ke wilayah sentra konsumen justru cenderung semakin menurun.

Jawa Timur yang selama ini merupakan andalan pemasok ternak sapi ke beberapa wilayah konsumen di dalam negeri menghadapi hal yang sama, yaitu kekurangan populasi ternak. Akhir-akhir ini kegiatan tersebut mulai tersendat, yang diakibatkan oleh semakin terbatasnya ternak sapi potong. Data dari Direktorat Jenderal Peternakan (2002) menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir (1990-2002) menunjukkan bahwa ternak dari Jawa Timur yang dikirim keluar wilayah mengalami penurunan rata-rata 14,2 persen pertahun. Sementara pemotongan ternak sapi potong yang dilakukan di wilayah Jawa Timur selama sebelas tahun (1992-2002) juga mengalami penurunan rata-rata 1,02 persen rata-rata per tahun.

Pemerintah daerah telah mengupayakan meningkatkan kinerja budidaya ternak sapi potong melalui program-program pengembangan ternak sapi potong. Kegiatan program pengembangan ternak yang ada, misalnya adalah program pengembangan ternak sapi potong melalui kegiatan Sistem Integrasi Padi Ternak Terpadu (SIPT). Sebenarnya kebijakan pengembangan ternak telah lama dirintis namun belum berjalan mulus, karena berbagai kendala dan hambatan masih banyak ditemui. Tidak dipungkiri lagi bahwa kegiatan program tersebut sangat membantu bagi sebagian peternak. Dari pelaksanaan berbagai program pengembangan ternak sapi potong tersebut, maka 200.586 ekor sapi potong berbagai jenis ras dapat dilahirkan melalui proses Inseminasi buatan (IB) (Yusdja *et al.*, 2001).

Kajian ini merupakan tinjauan terhadap bagaimana peran dan kinerja budidaya ternak sapi potong, serta menelaah bagaimana kinerja peran ternak dilihat dari aspek bisnis, pengembangan usaha dan kendala serta hambatannya yang berkaitan dengan komoditas tersebut. Hal lain yang cukup penting untuk ditelaah adalah bagaimana keragaman pelaksanaan program pengembangan ternak yang dilaksanakan di daerah, terutama dampak terhadap peternak peserta program maupun non peserta program pengembangan ternak sapi potong lainnya di kawasan Provinsi Jawa Timur.

POTENSI WILAYAH JAWA TIMUR

Potensi Lahan Sebagai Sentra Pengembangan Ternak

Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dataran dan pegunungan yang memiliki potensi lahan pertanian yang besar. Penggunaan lahan tahun 2002 menunjukkan sekitar 1.159.592 ha lahan sawah beririgasi yang terdiri dari 58,1 persen lahan irigasi teknis, 10,1 persen lahan irigasi setengah teknis, 10,6 persen lahan irigasi sederhana, 20,8 persen lahan irigasi tadah hujan, 0,01 persen lahan irigasi pasang surut dan 0,2 persen lahan irigasi lainnya. Lahan tersebut sebagian besar dapat ditanami padi setahun dua kali. Sementara lahan kering yang juga potensial untuk mendukung pengembangan ternak sapi potong, berupa lahan

tegalan dan kebun seluas 1.151.928 ha, lahan ladang seluas 59.249 ha dan lahan padang penggembalaan seluas 3.927 ha (BPS, 2002).

Penggunaan lahan yang demikian memperlihatkan bahwa wilayah ini memiliki potensi ketersediaan limbah pertanian sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila wilayah Jawa Timur disamping merupakan lumbung pertanian juga sekaligus merupakan lumbung ternak nasional. Hal inilah yang menjadikan usaha pengembangan ternak sapi potong dapat berkembang. Dengan demikian akan dapat memberikan peluang usaha dan dapat memberikan tambahan pendapatan sebagian masyarakat di pedesaan yang mengusahakannya.

Bagi rumah tangga petani yang tidak memiliki lahan garapan ternyata usaha ternak dapat memberikan kontribusi 22,0 persen dari total pendapatan keluarga. Sementara bagi rumah tangga yang menguasai lahan garapan kurang dari 0,5 ha, usaha ternak menyumbang pendapatan sampai 14,3 persen, dan bagi rumah tangga yang menguasai lahan garapan lebih dari 0,5 ha, usaha ternak menyumbang 11,7 persen dari total pendapatan (Salim, 1989). Hal senada juga dikemukakan oleh Rusastra (1985) bahwa keberadaan ternak sapi potong pada dasarnya dapat memberikan sumbangan pendapatan riil terutama bagi golongan petani berlahan sempit. Hal ini mengindikasikan bahwa ternak tidak hanya sebagai asset keluarga, namun lebih dari itu ternak merupakan komoditas andalan untuk mengatasi "kemelut ekonomi" bagi rumah tangga di pedesaan.

Jawa Timur merupakan daerah penyangga ternak sapi potong terbesar nasional, sehingga wilayah ini di samping mampu memenuhi sendiri kebutuhan konsumsi daging ternak, juga mampu mensuplai ternak hidup dan daging segar ke beberapa wilayah di Indonesia. Setidaknya sebanyak 118.000 ekor ternak sapi potong pada tahun 2002 telah dikeluarkan ke berbagai daerah. Ternak sapi potong merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Jawa Timur, yang pada tahun 2002 mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah (PDRB) sebesar 9,3 persen yaitu sebesar Rp 968.273 juta (Direktorat Jenderal Peternakan, 2002).

Perkembangan luas lahan pertanian khususnya lahan beririgasi di wilayah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1990 - 2001 mengalami penyusutan yang terus meningkat. Studi yang dilakukan oleh Pakpahan *et al.* (1993) menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut total lahan pertanian beririgasi mengalami penyusutan sebesar 0,35 persen dari 1.170.987 ha pada tahun 1990 susut menjadi 1.159.592 ha pada tahun 2001. Penyusutan tersebut terutama terjadi pada kelas lahan beririgasi setengah teknis, lahan beririgasi sederhana dan lahan tadah hujan sebagai dampak dari aktivitas pembangunan. Seperti diketahui bahwa kasus alih fungsi lahan di Jawa Timur secara rata-rata tidak kurang dari 8.800 ha pertahun, yang diakibatkan oleh konversi lahan pola pemukiman, pola industri, pola sarana dan prasarana serta pola-pola lainnya.

Hal ini berdampak terhadap penurunan areal lahan pertanian karena usaha budidaya ternak sapi potong wilayah ini didominasi oleh pola usaha tradisional yang lebih mengandalkan lahan sebagai basis pengembangan usaha. Keadaan ini merupakan ancaman bagi populasi dan pengembangan usaha ternak sapi potong tradisional. Kondisi tersebut berakibat pada tidak saja terhadap semakin menyusutnya populasi ternak sapi, namun juga menyebabkan munculnya migrasi tenaga profesi peternak sapi potong ke profesi lainnya diluar peternakan bahkan di luar pertanian (Adnyana *et al.*, 1996).

Perkembangan Populasi Ternak Sapi Potong

Secara nasional, Jawa Timur merupakan sumber populasi ternak sapi potong

dengan pangsa sebesar 24,1 persen (2002). Dibandingkan dengan kondisi empat tahun sebelumnya (1998) sebesar 28,09 persen, berarti telah terjadi penurunan. Data Direktorat Jenderal Peternakan (2003) memperlihatkan penurunan perkembangan populasi ternak tersebut sebesar 9,07 persen per tahun. Sebab lain yang mempengaruhi penurunan populasi ternak sapi potong di Jawa Timur adalah krisis ekonomi dan moneter. Turunnya impor sapi bakalan menyebabkan permintaan sapi potong lokal meningkat.

Secara geografis Jawa Timur merupakan produsen sekaligus konsumen daging sapi potong, juga merupakan wilayah transit ternak sapi potong hidup dari kawasan sentra ternak lainnya misalnya dari NTB, NTT maupun Bali yang dikirim ke Jawa Barat dan DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain seperti di Sumatera dan Kalimantan (Priyanto, 1998). Walaupun kawasan Jawa dan Bali secara umum merupakan wilayah sentra pengembangan ternak sapi potong yang sangat besar, namun Provinsi Jawa Timur tetap merupakan daerah terbesar populasi ternak sapi potongnya di antara wilayah-wilayah provinsi di Jawa dan Bali (Tabel 1).

Program Pengembangan Ternak.

Kebijakan pengembangan ternak sapi potong sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Kajian yang dilakukan oleh Nasution, (1983) menunjukkan bahwa dalam usaha pengembangan ternak sapi potong, pemerintah telah menempuh dua kebijakan yaitu : *Pertama*: melalui pengembangan ekstensifikasi ternak sapi potong yang menitikberatkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh (a) pengadaan dan peningkatan mutu bibit, (b)

Tabel 1. Populasi Ternak, Produksi Daging dan Konsumsi Daging Sapi Potong di Jawa dan Bali Tahun 1998 dan 2002, dalam perbandingan dengan kondisi nasional (%)

Wilayah	Populasi ternak		Produksi daging		Konsumsi daging	
	1998	2002	1998	2002	1998	2003
DKI Jakarta	0,0	0,0	8,1	3,9	1,7	4,8
Jawa Barat	1,3	1,8	17,4	21,3	20,2	20,4
Jawa Tengah	10,9	12,8	12,1	17,4	14,8	14,6
DI Yogyakarta	1,7	2,1	1,6	1,5	1,4	1,4
Jawa Timur	28,1	24,1	28,7	19,5	17,1	16,7
Bali	4,5	5,0	2,5	2,6	1,4	1,4
Total Jawa-Bali	46,6	45,8	70,6	66,4	59,8	59,4

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan, 2003.

penanggulangan penyakit dan parasit ternak, (c) peningkatan penyuluhan, (d) bantuan perkreditan, (e) pengadaan dan peningkatan mutu pakan/hijauan, dan (f) pemasaran. *Kedua* : melalui pengembangan intensifikasi atau peningkatan produksi per satuan ternak yaitu dengan peningkatan produksi secara ekonomis layak, yang didukung oleh kombinasi-kombinasi tertentu melalui penggunaan bibit unggul, pakan ternak dan penanganan manajemen yang baik.

Studi yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2001), menunjukkan bahwa untuk menghindari pengurasan populasi ternak sapi potong dalam jangka pendek diperlukan impor bibit dan sapi bakalan. Sementara untuk kepentingan jangka panjang diperlukan aplikasi teknologi IB, perbaikan mutu pakan, peningkatan produktivitas dan pengendalian penyakit ternak. Program lain yang merupakan upaya untuk meningkatkan populasi ternak sapi potong adalah Program Intensifikasi Sapi Potong (INSAP). Keterpaduan kedua program tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor daging maupun impor bakalan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan peternak setempat.

Salah satu keberhasilan program daerah adalah realisasi kelahiran pedet hasil Inseminasi Buatan mencapai 200.586 ekor. Dari jumlah tersebut 183.132 ekor merupakan sapi potong, 17.372 ekor adalah sapi perah dan sisanya 82 ekor kerbau. Kelahiran pedet hasil inseminasi buatan (IB) tampaknya masih jauh dari yang diharapkan, mengingat pada periode tahun yang sama (tahun 2000) jumlah ternak sapi yang dipotong untuk memenuhi konsumsi lokal Provinsi Jawa Timur tidak kurang dari 431.108 ekor. Belum termasuk ternak sapi potong yang keluar dari wilayah ini yang dikirim ke DKI Jakarta, Jawa Barat maupun yang diantar pulaukan pada tahun yang sama tidak kurang dari 154.424 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran pedet sebanyak 183.132 ekor hasil inseminasi tersebut belum mampu meredam penyedotan populasi ternak sapi potong di wilayah ini.

PERDAGANGAN DAN POLA PEMASARAN

Pengeluaran ternak dari wilayah Jawa Timur selama kurun waktu sepuluh tahun

terakhir sangat berfluktuatif, dengan kecenderungan negatif rata-rata 14,19 persen per tahun. Apabila perkembangan tersebut dilihat melalui dua titik waktu antara sebelum dan setelah adanya krisis moneter (1990 dan 1996), maka tampak perbedaan yang nyata dengan kecenderungan yang terus meningkat, yaitu sebanyak 298.537 ekor (1990) meningkat menjadi 314.134 ekor (1996). Artinya selama kurun waktu tujuh tahun tersebut pengeluaran ternak dari wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan rata-rata 1,8 persen per tahun. Peningkatan pengeluaran ternak sapi potong merupakan pengiriman rutin sapi-sapi lokal dan sapi-sapi impor hasil kereman yang berasal dari *feedlotter* setempat.

Pada tahun 1997 saat terjadinya krisis moneter, juga terjadi kemerosotan pengiriman ternak keluar daerah secara tajam dari 314.134 ekor pada tahun 1996 turun menjadi hanya 972 ekor. Artinya terjadi penurunan sebesar 99,75 persen. Krisis ekonomi dan moneter sangat berpengaruh terhadap kegiatan tersebut sampai tahun 1999 dan baru bangkit kembali mulai tahun 2000.

Untuk meningkatkan produksi sapi potong, maka peningkatan populasi dapat dicapai melalui kebijakan peningkatan reproduksi dengan sistem IB. Untuk itu pemerintah daerah setempat mengadakan kegiatan penggemukan sapi yang berasal dari bakalan impor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengurasan ternak lokal dan menciptakan peluang usaha baru melalui kegiatan usaha *feedlotter*.

Studi yang dilakukan oleh Yusdja *et al.* (2001), menunjukkan bahwa pada tahun 1997, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan setempat mencoba menjajaki usaha penggemukan ternak sapi potong dan bakalan impor. Usaha tersebut telah dipercayakan kepada tiga pengusaha *feedlotter* sebagai importir utama sapi bakalan, yaitu PT Sekar Bumi, PT Inkud Satwa Nusantara dan PT Santori. Berdasarkan SK Dirjend Peternakan tgl 27 Januari 1996 No. TN.150/233/V/1296, ketiga perusahaan *feedlotter* memperoleh jatah impor sapi bakalan sebesar 19.200 ekor walaupun pada kenyataannya melebihi quota yang dianjurkan.

Dengan kondisi yang demikian keragaan pola pemasaran ternak sapi potong diwarnai oleh kegiatan perdagangan lokal dan

regional antar wilayah kabupaten sebagai sentra-sentra ternak. Selain itu juga diwarnai oleh adanya kegiatan perdagangan ternak sapi potong antar wilayah provinsi maupun antar pulau. Melalui pola pemasaran yang demikian maka dengan sendirinya akan terbentuk beberapa jalur rantai tataniaga ternak sapi potong dari wilayah Provinsi Jawa Timur ke luar wilayah daerah. Dilihat dari aspek geografis, aktivitas perdagangan sapi potong di Jawa Timur dapat di kategorikan menjadi tiga wilayah pemasaran yaitu: aktivitas pemasaran lokal, aktivitas pemasaran regional dan aktivitas pemasaran internasional.

Pertama : Jaringan tataniaga lokal provinsi ternak sapi potong hidup artinya tataniaga jual-beli ternak sapi yang dilakukan oleh peternak/pedagang setempat. Dalam pola ini, transaksi jual beli dilakukan di pasar setempat. Baik antara pemilik ternak dengan pedagang pengumpul tingkat desa/kecamatan, atau kabupaten yang ada di Jawa Timur, atau transaksi antar pedagang pengumpul wilayah. Selain perdagangan sapi hidup, maka dalam memenuhi kebutuhan daging bagi konsumen setempat, Rumah Potong Hewan (RPH) di samping berfungsi sebagai tempat pemotongan hewan juga berfungsi sebagai tempat transaksi antara *bandar* (pedagang besar) daging dengan para *retailer* (pedagang pengecer).

Di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di Kota Pasuruan kini telah dibangun RPH dengan klasifikasi A. Hal ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan daging nasional. Dengan telah tersedianya RPH di Jawa Timur yang memenuhi standar, diharapkan tidak lagi memasok ternak hidup ke wilayah konsumen. Hal ini disamping dapat menekan biaya distribusi ternak juga dalam upaya untuk mendapatkan retribusi daerah serta menciptakan lapangan usaha setempat. Tujuan utama dioperasikannya RPH tipe A disamping untuk mengatasi masalah pemotongan ternak yang lebih memenuhi syarat terutama dari sisi sanitasi daging, juga diharapkan dapat menciptakan usaha baru dari produk sampingan berupa kulit dan pemanfaatan limbah RPH.

Kedua : Jaringan ternak hidup sapi potong regional, dari Jawa Timur sebagai pemasok utama ternak hidup ke berbagai wilayah seperti Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya di luar Jawa. Berda-

sarkan SK Direktorat Jenderal Peternakan No. 946/ TN.120/Kpts/DJP/1996, Jawa Timur telah mendapat jatah untuk memasok ternak sapi hidup ke Kalimantan Timur sebanyak 7500 ekor/tahun, walaupun pada kenyataannya sulit terpenuhi. Secara umum pola pemasaran kedua ini dilakukan dalam skala besar antar pedagang di kedua wilayah (Hutabarat *et al.*, 1998).

Sementara studi yang dilakukan oleh Adnyana *et al.* (1996), menyebutkan bahwa 56 persen ternak sapi potong hidup dari Jawa Timur telah didistribusikan ke Jawa Barat, 37 persen ke DKI Jakarta dan sisanya tujuh persen ke wilayah lainnya. Dengan adanya transaksi antar wilayah provinsi, maka wilayah Jawa Timur juga merupakan wilayah transit ternak dagangan dari sentra produksi di Bali, Nusa Tenggara Timur, maupun Nusa Tenggara Barat yang akan dikirim ke wilayah konsumen seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan wilayah konsumen lainnya.

Ketiga : Jaringan tataniaga internasional lebih diwarnai oleh adanya kegiatan impor daging segar dan ternak hidup. Untuk kasus Jawa Timur dengan adanya SK Direktorat Jenderal Peternakan No. TN 150/233-V/1996 yang memberikan mandat kepada tiga perusahaan *feedloter* untuk mengimpor ternak sapi bakalan, maka terbukalah jaringan tataniaga pengadaan ternak impor dari negara asal (Australia) ke Jawa Timur. Disamping itu dalam memenuhi kebutuhan daging kualitas khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen khusus seperti hotel-hotel berbintang, maka wilayah ini juga mendatangkan daging khusus impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa pembentukan dan keberadaan pasar bagi ternak sapi potong sangat penting artinya untuk menunjang pengembangan usaha komoditas yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Jamal (1994) bahwa untuk menunjang pengembangan ternak sapi potong, maka ketersediaan pasar hewan yang memadai dalam arti jumlah dan keterjangkauan oleh petani ternak akan banyak membantu mereka dalam memasarkan ternak sapi yang dihasilkan. Aktivitas pemasaran sapi potong di Jawa Timur di samping memiliki jalur distribusi lokal dan regional juga memiliki jalur internasional (Hutabarat *et al.*, 1998).

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG

Dalam rangkaantisipasi semakin meningkatnya permintaan konsumsi daging masyarakat, maka pada tahun 2000 pemerintah telah mencanangkan beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis peternakan khususnya ternak sapi potong. Jenis program tersebut di antaranya adalah Pengembangan Sistem Integrasi Padi Ternak secara terpadu (SIPT), yaitu program peningkatan produksi daging dengan mendorong populasi sapi produktif melalui perbaikan manajemen pemeliharaan, ketersediaan pakan dan mutu genetis. Program lainnya adalah program pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peternakan, dengan fokus kepada pengembangan komoditas unggulan, kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Program pengembangan ternak sapi potong lainnya adalah berupa program integrasi antara ternak sapi potong dengan komoditas perkebunan dan palawija dimana limbah dari kedua komoditas merupakan pakan ternak yang potensial. Program pengembangan integrasi ternak sapi potong di wilayah sentra perkebunan telah ditentukan, dimana kelapa sawit merupakan komoditas terpilih, sedangkan untuk palawija adalah tanaman jagung. Program SIPT pada tahun 2002 telah dikembangkan di 11 provinsi dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 14 provinsi (Direktorat Jenderal Peternakan, 2002).

Tujuan program tersebut antara lain adalah peningkatan produksi daging dengan mendorong populasi sapi produktif melalui perbaikan manajemen pemeliharaan, ketersediaan pakan dan mutu genetis. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lokasi program tersebut. Selain program yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerahpun melakukan kegiatan yang hampir sama pula. Inti kegiatannya adalah meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi potong.

Diwilayah Provinsi Jawa Timur sendiri, program pengembangan ternak yang berasal dari pemerintah pusat seperti SIPT telah dikembangkan di dua wilayah yaitu Blitar dan Bojonegoro. Blitar merupakan wilayah perta-

nian lahan sawah dengan beririgasi teknis dengan masa panen satu tahun tiga kali, sementara Bojonegoro merupakan wilayah lahan sawah irigasi setengah teknis.

Kegiatan Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) merupakan kajian yang lebih diarahkan pada pemanfaatan limbah secara maksimal antar dua komoditas utama yaitu limbah tanaman pangan dan limbah ternak. Melalui filosofi "Zero Waste" diharapkan kedua komoditas utama tersebut dapat ditingkatkan pengembangannya baik produksi, produktivitas, maupun kualitas lingkungan yang lebih seimbang antara keduanya. Ada tiga komponen teknologi utama dalam kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak tersebut yaitu: teknologi budidaya padi, teknologi budidaya ternak, dan teknologi pengolahan jerami dan kompos. (Haryanto *et al.*, 2002).

Secara umum terdapat tiga pola pemeliharaan sapi potong di Jawa Timur yaitu (1) pola pemeliharaan dengan sasaran utama untuk menghasilkan bakalan (*breeding*), (2) pola penggemukan/pembesaran/kereman sapi bakalan (*fattening*) dan (3) pola campuran antara keduanya. Penguasaan ternak oleh peternak perorangan umumnya bervariasi antara 2 sampai dengan 6 ekor per keluarga. Namun bagi pengusaha perorangan yang mengelola usaha penggemukan, mereka mampu memelihara antara 10 sampai dengan 30 ekor per keluarga.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi skala ekonomi yang lebih menguntungkan. Usaha budidaya ternak sapi potong yang diusahakan oleh masyarakat melalui pola-pola tersebut, terkonsentrasi pada usaha penggemukan ternak sapi impor, dan hanya sebagian kecil yang menggemukkan sapi lokal. Keragaan kondisi di lapangan berkaitan dengan usaha pengembangan budidaya ternak sapi potong di dua lokasi contoh di Jawa Timur diuraikan pada bagian berikut ini.

Pengembangan Ternak Kereman di Kabupaten Magetan dan Probolinggo

Kabupaten Magetan merupakan salah satu sentra penggemukan ternak sapi potong yang dilakukan oleh masyarakat peternak yang secara umum merangkap sebagai petani tanaman pangan maupun hortikultura. Kegiatan penggemukan sapi potong di wilayah ini

telah lama berkembang dan merupakan keterampilan yang sudah turun temurun. Wilayah ini mampu mengirim rata-rata 21.684 ekor ternak sapi potong per tahun keluar daerah baik untuk memenuhi permintaan daerah Jawa Timur, maupun ke luar terutama ke Jakarta dan Bandung.

Data pengeluaran ternak sapi potong dari wilayah Magetan selama periode 1999 - 2003 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yaitu mengalami rata-rata penurunan 9,36 persen per tahun. Pelaksanaan program APBD I telah dirintis sejak tahun 1999 dengan pengembangan penggemukan sapi potong sebanyak 1550 ekor yang terkonsentrasi di Kecamatan Poncol dan Kecamatan Plaosan. (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, 2004).

Sistem yang diterapkan pada pola APBD I adalah petani mendapat bantuan uang untuk pengadaan ternak sapi potong sebesar Rp 4 juta, dengan bunga modal sebesar 1,0 persen perbulan. Penjualan ternak sapi potong telah ditentukan yaitu pada bulan Desember. Pola tersebut tampaknya mengalami kegagalan disebabkan adanya akumulasi panen pada periode tertentu yang menyebabkan harga ternak jatuh.

Sementara sistem pada program APBD II adalah petani menerima uang sebesar Rp 4 juta, di mana bunganya dibayar per triwulan (Januari- April - Agustus). Dengan beban bunga sebesar 4 persen per triwulan, petani bebas menjual ternaknya pada bulan apapun sehingga pada triwulan akhir, petani diwajibkan membayar bunga triwulanan ditambah modal. Pola ini ternyata cukup berhasil sampai saat ini. Sementara itu wilayah ini juga pernah menerima bantuan ternak berupa program APBN berupa ternak hidup (Brahman Cross) sebanyak 50 ekor yang berasal dari Australia.

Kegiatan tersebut telah dikoordinasikan oleh Dinas Peternakan Tingkat Provinsi, dengan pola yang hampir sama. Bedanya adalah peternak dikenakan bunga modal 9 persen per tahun. Kelemahannya adalah bahwa sapi yang disalurkan adalah sapi hidup yang harga dan jenisnya telah ditentukan oleh pihak pelaksana proyek. Pola ini banyak dikhawatirkan oleh peternak penerima bantuan tersebut, karena harga dirasa terlalu tinggi. Informasi lain yang cukup penting adalah dam-

pak jatuhnya harga daging baik disebabkan oleh daging impor secara legal maupun yang ilegal. Hal ini menyebabkan sebagian peternak beralih profesi dari ternak sapi potong ke ternak ayam ras. Namun demikian ada indikasi bahwa pada saat ini kondisi harga ternak sapi potong mulai berkembang naik.

Dengan semakin padatnya populasi ternak sapi kereman yang hampir setiap rumah tangga memilikinya, menyebabkan kebutuhan pakan merupakan hal yang semakin mendesak. Pemanfaatan limbah pertanian setempat tampaknya tidak akan mencukupi, mengingat hampir setiap rumah tangga membutuhkannya. Hal ini sangat terasa bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Untuk mengatasi kekurangan pakan hijauan maka digunakan pakan pelengkap lainnya seperti dedak katul, ubi kayu maupun limbah industri seperti ampas tahu maupun ampas tapioka. Hal ini tentu mengakibatkan biaya produksi ternak semakin tinggi, mengingat sebagian dari pakan penguat seperti dedak dan singkong serta limbah industri tersebut harus dibeli. Namun demikian konsep pengembangan "Zero Waste" dimana pemanfaatan limbah pertanian maupun limbah peternakan di wilayah ini memang berhasil baik.

Permasalahan ke depan adalah populasi penduduk yang terus berkembang yang disertai dengan tuntutan pembangunan yang kadang mengorbankan lahan pertanian. Dikhawatirkan usaha budidaya ternak sapi potong di wilayah ini dapat terganggu. Alih fungsi lahan yang berdampak dengan semakin terbatasnya lahan pertanian yang pada akhirnya juga berdampak terhadap ketersediaan limbah pertanian yang saat ini telah mulai dirasakan, maka diperlukan upaya terobosan dalam pengembangan teknologi pakan ternak.

Pemanfaatan limbah industri seperti limbah industri tahu, minyak goreng, tapioka dan limbah industri lainnya di sekitar wilayah pengembangan ternak perlu dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu perlu juga ditempuh kebijakan pengembangan ternak sapi potong yang menyatu dengan usaha agro industri atau yang mendekati limbah perkebunan. Ada tiga kategori pemanfaatan limbah perkebunan yaitu : (a) limbah perkebunan yang dapat menjadi sumber energi tetapi rendah kandungan proteinnya, (b) mempunyai kandungan energi rendah tetapi tinggi kandu-

ngan proteinnya dan (c) rendah kandungan energi maupun kandungan proteinnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka di samping perlu mengoptimalkan pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, juga diperlukan penyusunan pakan yang seimbang yang kandungan nutriennya mampu mencukupi kebutuhan ternak (Tantono *et al.*, 2000; Ilham, 1995)

Kabupaten Probolinggo juga merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Timur yang potensial dalam pengembangan ternak sapi potong, memiliki kondisi hampir sama dengan wilayah Pasuruan. Budidaya ternak sapi potong di Probolinggo lebih berpola pengembangan ternak sapi potong secara kereman (penggemukan) maupun untuk pembibitan. Budidaya ternak sapi potong melalui pola penggemukan di wilayah ini dapat memberikan keuntungan bagi peternak. Usaha ini mampu memberikan *benefit cost ratio* (B/C) antara 1,29 sampai dengan 1,35 persen, dengan lama penggemukan antara 6 bulan sampai dengan satu tahun (Yusdja *et al.*, 2001).

Tingginya minat masyarakat untuk memelihara sapi potong, menyebabkan banyak peternak yang melakukan budidaya dengan sistem bagi hasil. Hal ini juga banyak ditemui di wilayah Pasuruan, Tuban dan wilayah sentra ternak sapi potong lain di Jawa Timur. Seperti yang dikemukakan oleh Simatupang (1994) bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong munculnya sistem gaduhan sapi di antaranya adalah : (a) belum berkembangnya lembaga keuangan desa, (b) bentuk usaha ternak masih bersifat usaha keluarga, (c) masih banyaknya keluarga yang berpendapatan rendah, dan (d) desa yang bersangkutan memiliki potensi produksi yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ternak dalam menopang kehidupan rumah tangga di pedesaan tidak saja penting bagi petani pemilik lahan, namun juga penting bagi rumah tangga di pedesaan yang tidak menguasai lahan garapan. Ternak dapat dikatakan sebagai sumber mata pencaharian penting bagi keluarga di pedesaan.

Pengembangan Sapi Potong Program SIPT di Kabupaten Blitar

Peta potensi ternak di wilayah Kabupaten Blitar sebenarnya didominasi oleh ternak

unggas terutama ternak ayam ras dan ternak itik. Berdasarkan kondisi geografis dan penggunaan lahan, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah setempat dalam pengembangan ternak sapi potong adalah menjadikan bagian utara yang lahannya didominasi lahan sawah untuk usaha penggemukan ternak sapi potong (*fattening*). Sementara Blitar bagian selatan yang lebih didominasi oleh lahan kering diarahkan untuk pengembangan ternak sapi potong dengan sistem *breeding*.

Program penggemukan ternak sapi potong di Blitar masih sangat terbatas, sehingga program pengembangan melalui kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT) tampaknya belum memberikan dampak positif secara signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini disebabkan ternak yang diberikan dalam program tersebut masih sangat terbatas jumlahnya.

Ternak sapi potong sebenarnya merupakan komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini sejalan dengan kebijakan daerah yang menempatkan tenaga inseminator sebanyak 52 orang yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah ini. Dengan bantuan tenaga inseminator tersebut, wilayah ini mampu meningkatkan keberhasilan pengadaan ternak potong khususnya ternak sapi potong melalui pedet (anak sapi) yang dihasilkan dari usaha inseminasi.

Saat ini di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan program pengembangan ternak sapi potong melalui kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT), yang dilaksanakan sejak tahun 2002 dan 2003 di Kecamatan Wlingi, Desa Klemuran (kelompok tani "*Among Tani*"). Pada tahun anggaran 2003 kegiatan yang sama dialokasikan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben dengan melibatkan dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani "*Rejeki Mulyo*" dan Kelompok Tani "*Ngudi Makmur*" (Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2003). Pada anggaran tahun 2002 telah dialokasikan ternak sapi potong betina sebanyak 86 ekor, sementara pada tahun 2003 sebanyak 40 ekor. Proyek tersebut sengaja diarahkan untuk pengembangan ternak bibit, karena saat ini usaha penggemukan banyak mengalami kegagalan akibat harga ternak yang cenderung merosot.

Dilihat dari aspek penerapan teknologi pakan peternakan khususnya ternak sapi po-

tong, pemanfaatan limbah pertanian terutama jerami, telah berhasil dengan baik dimana jerami segar sebagai digunakan pakan hijauan, sementara jerami kering diproses dengan menggunakan "starbio" sehingga dapat disimpan lama. Kualitas ternak tampaknya kurang memuaskan terutama dilihat dari penampilan yang terlihat kurus baik induk maupun pedet yang mengindikasikan adanya kekurangan gizi. Hal ini karena pakan yang diberikan masih didominasi oleh jerami kering ditambah sedikit hijauan.

Perkembangan populasi ternak yang diusahakan oleh kelompok tersebut menunjukkan adanya keberhasilan, setidaknya dilihat dari angka kelahiran dan keselamatan pedet. Permasalahan utama dalam pemeliharaan ternak pada kelompok ini adalah keterbatasan tenaga kerja, mengingat lokasi contoh adalah wilayah pertanian dengan masa panen padi tiga kali setahun. Sebagian besar curahan tenaga kerja keluarga lebih terfokus pada kegiatan usahatani padi, sementara pemeliharaan ternak sapi kurang tertangani. Hal ini diperkuat oleh rendahnya pengalaman berternak sapi oleh sebagian besar petani peserta program SIPT. Karena sebagian besar peserta proyek merupakan peternak pemula, sesungguhnya mereka masih membutuhkan bimbingan teknis secara terpadu, baik teknis pertanian maupun peternakan yang selama ini terkesan kurang adanya koordinasi.

Secara teknis pelaksanaan program SIPT di wilayah ini dapat dikatakan berhasil terutama dalam pemanfaatan limbah. Limbah jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara hasil kotoran ternak (kompos) juga dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok. Kegiatan program SIPT tersebut tentu membawa dampak terhadap peserta maupun non peserta kegiatan. Kegiatan program SIPT tersebut telah berpengaruh terhadap petani peserta maupun bagi petani bukan peserta, baik dampak terhadap curahan kerja keluarga, terhadap pola usaha, maupun terhadap usahatani tanaman pangan. Dengan adanya kegiatan SIPT, maka curahan jam kerja keluarga meningkat baik bagi peserta SIPT yang melakukan budidaya ternak sapi dengan pola *breeding* maupun pola penggemukan (*fattening*).

Dalam program SIPT, petani diarahkan untuk memanfaatkan pupuk kandang

secara maksimal, agar dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil usaha. Hasil panen padi pada musim hujan (MH) meningkat dari 1,13 ton menjadi 1,57 ton padi kering giling, sementara pada musim kemarau (MK) dapat meningkat dari 1,22 ton menjadi 2,12 ton padi kering giling. Tingginya hasil panen di musim kemarau disebabkan wilayah desa contoh secara agroekosistem merupakan daerah sawah irigasi yang sangat rentan terhadap banjir pada musim hujan. Meningkatnya hasil panen tersebut juga disebabkan oleh penggunaan pupuk kandang yang telah diolah menjadi kompos.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dengan mempelajari berbagai aspek usaha peternakan di wilayah Jawa Timur, beberapa temuan penting adalah: (a) Jawa Timur merupakan salah satu wilayah provinsi yang sangat potensial untuk pengembangan ternak sapi potong. Namun demikian, pengembangan usaha tersebut dihadapkan pada kondisi dimana populasi ternaknya cenderung menurun. Menurunnya populasi ternak sapi potong tersebut antara lain disebabkan karena semakin berkurangnya lahan pertanian karena berubah fungsi dan kegunaannya serta beralihnya profesi peternak ke profesi lainnya. (b) Tingginya permintaan ternak sapi potong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, regional maupun nasional, serta belum maksimalnya keberhasilan intensifikasi ternak melalui proses Inseminasi Buatan. (c) Program-program peningkatan populasi ternak sapi potong yang telah dan sedang berjalan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan. Kebijakan yang mengarah pada ekstensifikasi ternak potong seperti kasus program pengembangan ternak SIPT tampaknya masih harus terus diupayakan agar misi tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar perkembangan populasi sapi potong tetap terjaga maka disarankan: (a) perlu perlindungan terhadap wilayah kantong-kantong ternak terutama dalam hal kebijakan tata ruang ternak, dimana upaya-upaya alih fungsi lahan sebagai penyangga budidaya ternak perlu diawasi dengan seksama terutama oleh pemerintah daerah setempat. (b) pengembangan teknologi pakan terutama

pada basis wilayah padat ternak perlu diupayakan antara lain dengan pemanfaatan limbah industri dan limbah perkebunan. (c) Dalam menjaga keseimbangan populasi ternak terutama dalam menjaga stok *plasma nutfah* sapi potong lokal, maka kebijakan impor bibit atau sapi bakalan perlu diupayakan agar tidak terjadi pengurasan ternak lokal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging lokal, regional maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, MO., M. Gunawan, N. Ilham, K. Saktyanu, K. Kariyasa, I. Sadikin, dan A. Djulin. 1996. Prospek dan Kendala Agribisnis Peternakan Dalam Era Perdagangan Pasar Bebas. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2000. Daya Dukung Wilayah dan Usaha-usaha Peningkatannya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Sapi Potong. *dalam* Putu I.G., dkk., 2000. Laporan Hasil Diskusi Sehari Pengkajian Untuk Menentukan arah Industri Sapi potong di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2000. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2001. Luas lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia Tahun 1990 - 2001. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2002. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 -2002. BPS. Jakarta.
- Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 1999/2000. Laporan Tahunan. Departemen Pertanian.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 1992-2002. Peternakan Dalam Angka. Departemen Pertanian.
- Haryanto, B., B. Arsana dan K. Dwiyanto. 2002. Sistem Integrasi Padi-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Hermanto, M. Rachmat, Supriati dan Saptana. 1992. Analisis Peran Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Nasional Dalam Investasi di Subsektor Perkebunan, Perikanan dan Peternakan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Hutabarat, B., B. Rachmanto, B. Winarso, M. Iqbal, H. Supriyadi, J. Situmorang, dan M. Tambunan. 1998. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumber-sumber Pertumbuhan Produksi Pertanian Unggulan Di Kalimantan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta
- Ilham, N. 1995. Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia: Ditinjau dari Potensi Sumberdata Pakan dan Lahan. Forum Penelitian Agro Ekonomi vol.13 No.2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Ilham, N., B.Wiryono, IK. Kariyasa, MNA. Kirom, dan S. Hastuti. 2001. Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Peternakan Unggulan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Jamal, E. 1994. Analisis Pemasaran Sapi potong di Provinsi Bali. Forum Penelitian Agro Ekokomi Vol. 12 No. 1. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Mayrowani, H., Supriyati, B. Rahmanto dan Erwidodo. 2003. Kajian Perdagangan Komoditas Pertanian Antar Wilayah Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Nasution, A. 1983. Studi Evaluasi Pengembangan Ternak dan Kerbau. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 2. No.1. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafa'at, HP. Saliem, S. Priyatno dan A. Saktyanu. 1993. Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Priyanto, D. 1998. Timor-Timur Sebagai Potensi Sapi Potong Untuk Diantar Pulaukan. Analisis Karakteristik Sosioekonomi Pelaku Usaha Ternak. Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Rusastra, I.W. 1985. Optimalisasi Integrasi Tanaman Pangan dan Ternak Sapi Pada Berbagai Topografi Lahan di Bali. Jurnal Agro Ekonomi Vol 4; No. 1. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Salim, H. 1989. Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Beberapa Desa di Jawa Timur. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P., E. Jamal dan MH. Togatorop. 1994. Sistem Gadohan Sapi Tradisional Bali Faktor Pendorong, Penopang dan Karakteristiknya. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 12. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Tantono, S. dan B. Haryanto. 2000. Peluang Integrasi Usaha Pengembangan Sapi Potong dengan Lahan Perkebunan. *dalam* Putu I.G., dkk., 2000. Laporan Hasil Diskusi Sehari Pengkajian Untuk Menentukan arah Industri Sapi potong di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Yusdja, Y., H. Malian, B. Winarso, R. Sayuti dan A. Bagyo. 2001. Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Peternakan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Yusdja, Y., Rosmiyati S., B. Winarso, I. Sadikin dan C. Muslim. 2004. Pemantapan Program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.